
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA YENDI BEACH PADA KAMPUNG YENDIDORI DISTRIK YENDIDORI KABUPATEN BIAK NUMFOR

Djamil Hasim

Program Studi Administrasi Publik, IISIP Yapis Biak

Email: karsipapua10@gmail.com

Diterima: 31 Oktober 2019; Direvisi: 29 Juli 2020; dipublikasikan: 28 Agustus 2020

ABSTRAK

Sasaran pembangunan pariwisata pada dasarnya adalah untuk meningkatkan status pariwisata dari subsector pembangunan menjadi sektor pembangunan andalan yang mampu menggiatkan perekonomian dan sektor-sektor lain yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Pengembangan Objek Wisata Yendi Beach pada Kampung Yendidori Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. Teknik pengumpulan data yang digunakan, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Yendi Beach Kampung Yendindori di Kabupaten Biak Numfor dominan sebagai motivator. Dinas Pariwisata sebagai salah satu stakholder pariwisata di Kabupaten Biak Numfor dibutuhkan perannya dalam rangka memotivasi masyarakat, investor, dan pengusaha wisata.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Pengembangan.

ABSTRACT

The goal of tourism development is basically to improve the status of tourism from the development sub-sector to the mainstay development sector that is able to activate the economy and other related sectors. This study aims to determine the Government's Role in the Development of Yendi Beach Tourism Object in Yendidori Village, Yendidori District, Biak Numfor District. Data collection techniques used such as; observation, interview and documentation. The analytical method used is qualitative analysis. The results showed that the role of the Tourism Office in the Development of Yendi Beach Tourism Potential Yendindori Village in Biak Numfor Regency was dominant as a motivator where the Tourism Office as a tourism stakholder in Biak Numfor District needed its role in motivating the community, investors and tourism entrepreneurs.

Keywords: Role, Government, Development.

PENDAHULUAN

Secara mendasar, salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia karena secara tegas telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Muh Asran Z Labaran, Lukman Hakim, 2014). Lebih lanjut, Pernyataan tersebut memberi arti bahwa pemerintah mempunyai peranan sentral baik secara perencana, penggerak, pengendali, dan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan nasional (Muh Asran Z Labaran, Lukman Hakim, 2014). Pengembangan sektor pariwisata merupakan suatu tindakan yang realistis dan logis, mengingat dampak positif yang ditimbulkan di antaranya semakin meluasnya kesempatan usaha, baik hotel, biro perjalanan, toko cinderamata maupun meningkatnya pendapat masyarakat dan mendorong terpeliharanya keamanan dan ketertiban walaupun sebenarnya “juga” ada hal-hal yang berdampak negatif (Harnida, 2012). Adanya otonomi daerah sangat diharapkan daerah mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerahnya dengan melakukan identifikasi dan mengelola sumber-sumber yang berpotensi untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, karena besar kecilnya pendapat daerah sangat berefek kepada keberhasilan pelaksanaan otonomi tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan konsep otonomi dan desentralisasi yang pada hakikatnya memberikan kekuasaan, kewenangan, dan keleluasaan kepada pemerintah daerah (Harnida, 2012).

Pengembangan pariwisata pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kekayaan wilayah nusantara sebagai modal dan landasan pengembangan budaya bangsa secara keseluruhan dapat dinikmati oleh masyarakat (Masita Hi.Modim, Andi Samsu alam, 2010). Lebih lanjut, terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam pembangunan, pemerintah perlu mengetahui yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan kemauannya, serta pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan (Husnul Imtihan, Wahyunadi, 2017). Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting peranannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya dan daya dukungnya. Pembangunan dalam wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat besar apabila dikelola secara profesional, karena sumbangan bagi daerah yang bersangkutan, pariwisata dapat memacu pertumbuhan kawasan sekitar objek wisata tersebut (Taufik, 2013).

Menurut Ndraha (dalam Soares et al., 2015) bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual dengan ini peran pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan seseorang tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seorang pemimpin, karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di lingkungan masyarakat maupun pemerintah. Kepemimpinan yang tepat juga mendukung proses pembangunan pada suatu pemerintahan, dimana ketepatan dalam proses pembagian tugas dan wewenang secara tepat secara langsung akan membantu proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan (Edyanto, 2018). Lebih lanjut, kepemimpinan yang tepat juga mendukung proses pembangunan pada suatu pemerintahan, dimana ketepatan dalam

proses pembagian tugas dan wewenang dengan tepat secara langsung akan membantu (Rasyid, dalam Edyanto, 2018).

Kepemimpinan merupakan proses atau serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lain berisi menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan serta mengawasi orang lain dalam berbuat sama. Seluruh kegiatan itu dapat disebut sebagai usaha mempengaruhi perasaan, pikiran, dan tingkah laku orang lain ke arah pencapaian tujuan. Kepemimpinan juga bisa diartikan proses interaksi antara pemimpin dengan pegawainya untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan tujuan organisasi. Kepemimpinan pada suatu organisasi sangat ditentukan oleh cara pimpinan mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat. Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Di satu pihak, manusia terbatas kemampuannya untuk memimpin dan di pihak lain ada orang yang mempunyai kelebihan kemampuan untuk memimpin. Di sinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan. Lebih lanjut, Kepemimpinan merupakan perilaku mempengaruhi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai secara efektif dan efisien (Eko Purnomo, 2018).

Betapa pentingnya pemimpin dan kepemimpinan dalam suatu kelompok jika terjadi suatu konflik atau perselisihan di antara orang-orang dalam kelompok, orang-orang mencari cara pemecahan supaya terjamin keteraturan dan dapat ditaati bersama. Kepemimpinan yang tepat juga mendukung proses pembangunan pada suatu pemerintahan, ketepatan dalam proses pembagian tugas dan wewenang secara tepat dan langsung akan membantu proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan tersebut adalah faktor kepemimpinan. Dalam hal ini, pemimpin yang menjadi lokomotif ke arah daerah akan dibawa. Kepemimpinan juga merupakan sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut atau bawahan yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya. Dengan demikian, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan menciptakan budaya organisasi dan komunikasi yang berkualitas, sehingga menunjang terciptanya tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan aktivitas orang-orang yang terjadi di antara orang-orang, dan bukan sesuatu yang dilakukan untuk orang-orang sehingga kepemimpinan melibatkan pengikut atau *Followers*. Proses kepemimpinan juga melibatkan keinginan dan niat, keterlibatan yang aktif antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Dengan demikian, baik pemimpin ataupun pengikut mengambil tanggung jawab pribadi atau *personal responsibility* untuk mencapai tujuan bersama.

Kepemimpinan adalah sebuah topik yang masih sangat menarik untuk diteliti. Kepemimpinan itu esensinya adalah pertanggungjawaban. Lebih lanjut, Kepemimpinan adalah kemampuan positif memengaruhi orang dan sistem untuk memberikan dampak yang berguna dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan (Washua, 2017). Masalah kepemimpinan masih sangat baik untuk diteliti karena tiada habisnya untuk dibahas di sepanjang peradaban umat manusia. Ibaratnya, semakin sulit mencari pemimpin yang baik (*good leader*). Kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh banyak hal, salah satunya adalah kepemimpinan yang berjalan dalam organisasi tersebut. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin tersebut mampu menjadi pencipta dan pendorong bagi bawahannya dengan menciptakan suasana dan budaya kerja yang dapat memacu pertumbuhan dan memberikan pengaruh positif bagi karyawannya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diarahkan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu pendukung terciptanya etos kerja yang tinggi adalah peran pemimpin yang mampu menampilkan kepemimpinan yang baik dan tepat. Eksistensi pemimpin makin penting ketika dihadapkan pada situasi dengan keragaman karakteristik dan kemampuan yang dimiliki anggota organisasi.

Kepemimpinan adalah faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan adalah *masalah relasi* dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari *interaksi otomatis* di antara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (ada relasi interpersonal). Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang-orang lain guna melakukan sesuatu, demi pencapaian satu tujuan tertentu. Lebih lanjut kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain atau seni untuk mempengaruhi perilaku manusia, baik secara perseorangan maupun kelompok.

Kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi para pengikut, pilihan dari sasaran bagi kelompok atau birokrasi, pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk menggapai sasaran-sasaran tersebut, motivasi dari para pengikut untuk mencapai sasaran dan pemeliharaan. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada dalam dan bukan di luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus mewujudkan dalam interaksi antara individu di dalam situasi sosial suatu kelompok/organisasi. Tugas pokok kepemimpinan yang serupa mengantarkan, mengelompokkan, memberi petunjuk, mendidik, membimbing, dan sebagainya yang secara singkat menggerakkan enam. Agar para bawahan mengikuti jejak pemimpin mencapai tujuan organisasi, hanya dapat melaksanakan secara baik bila seorang pemimpin menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Berbicara pariwisata yang terletak di kawasan timur, Papua adalah wilayah yang paling menarik karena mempunyai potensi alam yang luar biasa. Salah satunya adalah Yendi Beach yang ada di Kampung Yendidori Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. Potensi tersebut, dengan keunikan dan kecantikan yang dimilikinya menjadi modal berharga untuk memajukan sektor pariwisata di Biak Numfor. Pembangunan pariwisata yang maju tidak akan berjalan sukses tanpa dukungan semua pihak. Mengingat masih belum berkembang maka memerlukan pengembangan objek wisata serta mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Area Yendi Beach yang lebih baik lagi dengan menitikberatkan pada aspek berkelanjutannya.

Dalam mendukung destinasi kepariwisataan di Biak Numfor yang ada di Kampung Yendidori, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor diharapkan dapat menyediakan beberapa fasilitas, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2011 tentang kepariwisataan Pasal 38 menyebutkan bahwa fasilitas kepariwisataan milik daerah terdiri dari fasilitas usaha akomodasi, usaha rekreasi dan hiburan, atraksi wisata, wisata bahari, pelatihan kepariwisataan dan pelayanan informasi kepariwisataan. Oleh sebab itu, fasilitas penunjang diharapkan dapat tersedia agar para wisatawan tertarik untuk melakukan kunjungan wisata, karena penyebab sepihnya kunjungan pariwisata di Papua Khususnya di Kabupaten Biak Numfor jika dibandingkan dengan daerah lain, meski nilai tawar pariwisatanya begitu menggiurkan, namun untuk melakukan perjalanan ke Papua masih dianggap mahal, baik secara finansial maupun secara fisik. Hasil pengamatan peneliti pada objek yang diteliti, pengembangan dalam pengelolaan objek wisata yang ada di kampung Yendidori belum maksimal, sehingga memberikan pengaruh yang besar juga kepada masyarakat yang kepedulian masyarakat yang ada di kampung Yendidori dalam mengembangkan objek wisata tidak maksimal dan membiarkan objek wisata tersebut tidak terurus, sehingga minat wisatawan masih kurang.

Kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengembangkan objek wisata ini, antara lain membiarkan fasilitas yang ada di objek wisata tersebut rusak, tidak membersihkan lingkungan objek wisata, kurangnya akses komunikasi yang baik, kurangnya transportasi yang memadai, serta

penginapan yang kurang memadai, sehingga wisatawan merasa tidak nyaman. Adapun yang berkaitan dengan kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata Yendi Beach penyebabnya antara lain kurangnya spot foto yang merupakan tempat untuk berfoto bagi para wisatawan, kurang tereksposnya objek wisata Yendi Beach di media massa atau media sosial.

Dari latar belakang tersebut di atas itulah membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Objek Wisata di Kampung Yendidori Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor dengan mengangkat judul utama. "Peran Pemerintah dalam Pengembangan Objek Wisata Yendi Beach pada Kampung Yendidori Distrik Yendidori Kabupaten Biak.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pada tahap awal penelitian ini akan melakukan wawancara mendalam terhadap informan. Adapun yang dijadikan sebagai informan penelitian, yaitu pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Kepala Kampung, dan dari BAMUSKAM Kampung Yendidori, serta pemilihan informan melalui *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, teknik analisis data kualitatif, yaitu menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan informan dalam bentuk catatan dan rekaman, dokumentasi atau foto objek, yang berkaitan dengan penelitian serta mencari melalui literatur yang ada di perpustakaan, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, dan situs internet yang berkenaan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data, melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Yendi Beach Pada Kampung Yendidori

Pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legalstate*) sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu Negara kesejahteraan (*welfare state*). Di sini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan, yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu.

Pengembangan Objek Wisata Yendi Beach pada Kampung Yendidori Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor yang berfokus pada Pemerintah Kampung Yendidori dan Dinas Pariwisata yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata. Pemerintah mempunyai peranan sentral, baik secara perencana, penggerak, pengendali, maupun pengawas dalam pelaksanaan pembangunan nasional (Muh Asran Z Labaran, Lukman Hakim, 2014). Sebagaimana dikatakan bahwa Pariwisata menurut UU No.9 Tahun 1990 adalah segala

sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha, daya tarik, dan atraksi wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Pengertian tersebut meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, sebelum dan selama dalam perjalanan dan kembali ketempat asal, pengusaha daya tarik atau atraksi wisata, (pemandangan alam, taman rekreasi, peninggalan sejarah, penggelaran seni budaya). Usaha dan sarana wisata, berupa usaha jasa, biro perjalanan, pramuwisata, usaha sarana, akomodasi dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata.

Adanya Undang-undang No.32 Tahun 2004 menyebabkan adanya pendelegasian dan pengaturan sektor-sektor tertentu pada satuan tingkat daerah. Begitu pula dengan bidang pariwisata, organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata adalah Dinas Pariwisata. Secara garis besar Peran Dinas Pariwisata adalah melakukan tugas pemerintah dengan mengelola pariwisata yang ada di suatu daerah. Secara spesifik adalah memberdayakan masyarakat untuk bersama mengembangkan pariwisata yang ada di daerah. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh ahli, maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata mencakup pendorong bagi masyarakat lokal agar senantiasa mendukung perkembangan pariwisata di wilayahnya (motivator), penyediaan fasilitas pendukung pariwisata (fasilitator), kerjasama yang sinergis dengan berbagai kelompok kepentingan (stakeholder) pariwisata (dinamisator). Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai suatu organisasi/instansi. Penetapan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pembangunan Pariwisata Kabupaten Biak Numfor didasarkan pada bidang-bidang strategis. Memahami kepemimpinan tidak lepas dari perilaku, karakter, gaya memimpin dari individu yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin. Dari aspek etimologi leadership dapat ditelusuri maknanya dengan mengupas secara harfiah. Pemaknaan secara harfiah lebih cenderung menelusuri asal muasal kata pembentuk konsep tersebut. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok.

Pada dasarnya, tujuan pengembangan setiap kawasan wisata yang ada di Kabupaten Biak Numfor khususnya kawasan objek wisata Yendi Beach pada Kampung Yendidori Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor memberikan manfaat atau keuntungan bagi pemerintah, wisatawan, dan terutama warga atau masyarakat setempat. Dengan pengembangan yang dilakukan, memberikan manfaat yang sangat besar terutama masyarakat setempat melalui peningkatan ekonomi yang mereka dapatkan. Hal ini juga ditambahkan oleh Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata yang menyatakan :

“.....Peran pemerintah khususnya dari dinas pariwisata untuk yendidori itu tahun 2007-2008 sudah ditetapkan sebagai objek wisata. Kita dari pemerintah mulai dari pariwisata, kita sudah mulai bikin pondok-pondok disana jadi kita adakan pondok-pondok wisata disana terus kita serahkan kemasyarakat untuk dikelolah untuk wisatawan yang datang dan dari pemerintah kabupaten biak numfor khususnya dari dinas pariwisata. Kita untuk objek wisata yendidori itu ada suatu perencanaan, jadi perencanaan itu dikhususnya yendidori itu pengelolaan lahan, infrastruktur yang disana untuk masyarakat sana jadi pengelolaan disana harus sebenarnya kalau sekarang juga harus bebas tapi sampai sekarang ini masyarakat Biak agak-agak susah jadi tanah atau lahan itu masih bergandengan jadi hak wilayah masih kuat kayak fam. Untuk sekarang khususnya dana DAK sampai 2019 ini untuk pembangunan harus bebas lahan jadi harus hak wilayah bebas baru dibangun tapi sampai saat ini masih berapa persen yang mempunyai bebas lahan jadi semua masih fam, jadi itu yang kita rencanakan”. (Hasil wawancara, 10 Juli 2019).

Ketua Bamuskam Kampung Yendidori juga mengemukakan bahwa Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Yendi Beach :

“.....Untuk pariwisata sementara ini sudah berjalan, cuma kami punya pantai ini dulu kan anak-anak IISIP YAPIS sendiri yang rehap itu pantai disana dan sudah jalan dengan baik. Sementara ini lagi dipakai tapi ya begitulah karena dari pemerintah juga belum begitu serius menanggapi, apa itu menangani kampung ini dengan apa itu kebutuhan-kebutuhan lain, cuma ini hanya dari pemimpin dari desa saja yang selama ini menangani pantai ini”.(Hasil wawancara, 11 Juli 2019)

Dari pernyataan Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata dan Ketua Bamuskam Kampung Yendidori dapat dijelaskan bahwa pengembangan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selain untuk melestarikan kawasan wisata juga dapat menunjang perekonomian masyarakat kecil, sehingga pengembangan yang dilakukan sangat bermanfaat bagi pemerintah, wisatawan dan terutama masyarakat perekonomian kecil dimana mereka dapat menumbuhkan pendapatan ekonomi mereka. Namun, masih terdapat kendala yang perlu dibenahi, yakni pemanfaatan lahan wisata secara maksimal serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata. Seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Wisata menambahkan :

“.....Peran Pemerintah dalam pengembangan objek wisata bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah”. (Hasil wawancara, 12 Juli 2019).

Dalam hal pengembangan potensi wisata Yendi Beach pengembangan potensi wisata akan membuat pendapatan asli daerah meningkat. Hal ini disebabkan oleh seiring pengembangan potensi wisata dalam hal ini Yendi Beach Kampung Yendidori dilakukan, secara otomatis pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan produk pariwisata khas akan ditingkatkan guna menarik pengunjung/wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata ini.

Dengan usaha-usaha pengembangan tersebut di atas, sesuai dengan harapan akan terjadi kenaikan jumlah wisatawan yang akan berdampak pada penjualan tiket (Retribusi) yang akan berkontribusi pada peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah. Di dalam konsep pengembangan, peran pemerintah sangat menentukan keberhasilan suatu pembangunan wisata dan juga tentu akan menggerakkan perekonomian lokal daerah tersebut. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga akan tumbuh, sehingga pemberdayaan masyarakat lokal akan berdampak positif. Konsep pengembangan Yendi Beach Kampung Yendidori yang menjadi tempat wisata nyaman dengan segala pelayanan, keindahan dan cinderamata yang ditawarkan akan langsung berdampak pada kenaikan pendapatan asli daerah secara signifikan.

Tak hanya sampai di situ peran pemerintah juga dapat menentukan arah dan partisipasi masyarakat yang ada di sekitar daerah objek wisata dan mencakup keseluruhan dari berbagai adat dan budaya yang ada di Kampung Yendidori terutama di Kabupaten Biak Numfor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penghargaan terhadap budaya dan kelestarian alam setempat. Jika hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah terus ditingkatkan, bukan hal mustahil daerah di sekitar Yendi Beach akan menjadi daerah wisata yang berkembang dan mandiri. Oleh karena itu, untuk melihat peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata Yendi Beach maka kita dapat lihat konsep yang ditawarkan pemerintah, untuk itu penulis mencoba menggambarkan peran pemerintah berdasarkan teori yang dikemukakan ahli, seperti motivator, fasilitator dan dinamisator. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi untuk mencapai kesetiaan ini, seorang pemimpin sendiri harus memberi teladan yang baik, dalam pemikiran kata-kata dan tingkah laku, sehari-hari yang menunjukkan kepada anak buahnya.

Pemimpin sendiri pernah mengingkari dan menyeleweng dari loyalitas segala sesuatu tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

1. Memberikan Motivasi

Pemerintah dapat menciptakan semangat atau spirit untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak hanya memerlukan pengembangan faktor penawaran saja yang menaikkan kapasitas produksi masyarakat, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam, kapital dan teknologi, tetapi juga faktor permintaan luar, tanpa kenaikan potensi produksi tidak dapat direalisasikan. Kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi orang lain untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi yang relevan. Kepemimpinan berbeda dengan pimpinan. Pimpinan adalah seseorang yang bertugas untuk memimpin di suatu organisasi/instansi atau sering disebut sebagai seorang manajer, sedangkan kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain, untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Dalam suatu organisasi, faktor kepemimpinan memegang peranan yang penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sekaligus merupakan tugas yang tidak mudah. Tidak mudah, karena harus memahami setiap perilaku bawahan yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian (Edyanto, 2018), bahwa pemimpin hendaknya mempunyai visi yang menarik untuk masa depan, serta menetapkan standar yang tinggi bagi para bawahan, optimis dan memiliki antusiasme, memberikan dorongan dan arti terhadap apa yang perlu dilakukan. Dalam kepemimpinannya mampu menerapkan standar yang tinggi sekaligus mampu mendorong bawahan untuk mencapai standar tersebut. Karakter seperti ini mampu membangkitkan rasa optimis untuk membangun.

Untuk itu, pemerintah harus melakukan perubahan dan menciptakan suatu pemikiran, cara menciptakan lapangan kerja supaya bisa mengurangi pengangguran dan bisa meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya yang ada Kampung Yendindori Kabupaten Biak Numfor. Konsep motivator ini sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan motivasi masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat untuk lebih mencintai wilayah pembangunan wisata yang ada. Olehnya, itu peran pemerintah sangat penting dalam mengembangkan objek wisata Yendi Beach dan melibatkan masyarakat serta memberikan motivasi kepada seluruh jajaran pemerintah untuk lebih aktif dalam mengembangkan produk wisata yang ada. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara Tokoh Masyarakat Kampung Yendindori menyatakan :

“.....Harapan kami secara khusus untuk aparat pemerintah kampung harapan kami selaku warga masyarakat mengharapakan agar dana yang diberikan oleh pemerintah ini agar lebih dimanfaatkan dengan baik sehingga yang tadinya wisata yang dikampung yendidori ini sementara mau dikembangkan kedepan lebih berkembang dan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya karena merupakan pantai yendidori salah satu ikon wisata di Kabupaten Biak Numfor yang juga merupakan aset bagi kampung ini untuk menambah inkam dari kampung ini”. (Hasil wawancara, 13 Juli 2019)

Kepala Seksi Pendapatan Dan Perencanaan juga menambahkan bahwa :

“.....Memang untuk SDM didinas pariwisata sendiri sudah siap, Cuma yang masih kami genjot adalah SDM masyarakat karena kita punya masyarakat ini, masyarakat petani, nelayan, yang mau kita atur untuk menjadi wiraswastawan dibidang pariwisata. Ini butuh

waktu dan kita sudah mulai dengan kelompok-kelompok sadar wisata yang kita buat dari pariwisata dan kelompok-kelompok ini kita binah beberapa kali kita libatkan dalam kegiatan latihan dan kita harap sebagai jembatan penghubung pariwisata dikelompok-kelompok yang ada". (Hasil wawancara, 10 Juli 2019).

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa Pengembangan di dalam sektor pariwisata akan berhasil dengan baik jika masyarakat luas dapat berperan atau ikut secara aktif. Agar masyarakat luas dapat berperan dalam pembangunan keparawisataan, masyarakat diberi kephahaman tentang yang dimaksud dengan pariwisata serta manfaat dan keuntungan yang diperoleh. Di samping itu, masyarakat juga harus mengetahui hal-hal yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh masyarakat tersebut.

2. Memberikan Pelatihan dan Pendidikan Kepada Pengelola Objek Wisata

Beberapa masalah yang dihadapi dalam dunia pariwisata pada saat ini. Satu di antaranya adalah bahwa situasi informasi dan dokumentasi tentang pariwisata pada umumnya, khususnya dokumentasi tentang wisata budaya, masih belum lengkap dan tertata dengan baik. Industri pariwisata sepenuhnya adalah industri jasa (*service industry*) yang tergantung pada mutu tenaga kerja. Juga industri ini padat informasi dan padat tenaga berketerampilan (*skills*). Masa kini adalah suatu periode informasi pada umumnya sangat penting. Dengan laju pertumbuhan yang tinggi, perpindahan informasi pada tingkat internasional tenaga kerja profesional sangat penting. Oleh karena itu, industri pariwisata mempunyai kebutuhan yang lebih luas dalam rangka memaksimalkan hasilnya. Salah satu sarana penunjang adalah tersedianya suatu sistem dokumentasi yang dapat menghemat waktu dan menyediakan bahan yang tepat menurut bidang tertentu.

Berkembangnya industri pariwisata yang semakin pesat sebaiknya juga diimbangi dengan pengembangan sumber daya manusianya, karena manusia merupakan penggerak seluruh kegiatan kepariwisataan dan menjadi faktor terpenting. Lebih lanjut, hasil penelitian (Purmada et al., 2016) bahwa pengelolaan sumber daya pariwisata untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan, pengelola wajib melakukan manajemen sumber daya yang efektif. Manajemen sumberdaya digunakan untuk menjamin perlindungan terhadap ekosistem dan degradasi kualitas lingkungan. Sumber daya manusia dalam bidang pariwisata meliputi pengelola kawasan wisata, pemandu wisata, dan semua yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata. Kinerja SDM merupakan salah satu faktor terpenting yang perlu diperhatikan untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini oleh pengelola Wisata Yendi Beach mengemukakan bahwa:

"Yang mungkin kami sampaikan ini lewat dinas pariwisata yang mana sudah beberapa kali memberikan materi maupun peraktek yaitu mnegenai pengetahuan pengelolah pantai, banyak yang kami sudah ikuti dan juga beberapa anggota yang sudah paham tentang itu, sehingga yang kami sampaikan bahwa mereka bisa bekerja". (Hasil wawancara, 8 Juli 2019).

Hasil wawancara dengan Sekretaris Kampung Yendidori mengemukakan bahwa :

".....Yang saya tahu sampai saat kita bicara ini belum ada dari pariwisata yang datang langsung untuk penyuluhan bagaimana dengan kita punya, atau harus siapkan objek wisata itu seperti apa itu sampai sekarang belum".(Hasil wawancara, 11 Juli 2019).

Hasil wawancara di atas dapat dianalisis dan diuraikan bahwa pemberian pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat dalam hal ini pengelola objek wisata Yendi Beach belum optimal, hal ini terlihat bahwa kualitas SDM yang ada belum mampu menerapkan proses pengelolaan objek wisata yang baik, sehingga pemasaran wisata terkendala karena masyarakat belum memiliki

keterampilan dalam mengembangkan objek wisata yang ada, terutama kinerja pengelola wisata karena mereka merupakan orang yang pertama kali dijumpai oleh wisatawan. Pengelola objek wisata memiliki peranan yang sangat penting karena selama dalam masa liburannya wisatawan lebih banyak bersinggungan atau beradaptasi dengan pengelola sekaligus pemandu wisata. Baik buruknya kesan yang diterima wisatawan banyak ditentukan oleh peran seorang pemandu wisata.

3. Pengembangan Objek Wisata Yendi Beach Kampung Yendidori Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor

Disadari bahwa proses pembangunan adalah suatu proses perubahan masyarakat. Proses perubahan ini mencerminkan suatu gerakan dari situasi lama (tradisional) menuju suatu situasi baru yang lebih maju (modern) dan belum dikenal oleh masyarakat. Perubahan yang dilakukan tersebut akan melalui proses transformasi dengan mengenalkan satu atau beberapa fase antara. Pembangunan masyarakat memerlukan suatu proses dan model transformasi dari model lama menuju model baru (tujuan). Di sisi lain perlu pula untuk dipahami bahwa proses pembangunan merupakan suatu konsep yang optimistik dan memberikan pengharapan kepada mereka yang secara sukarela berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga perencanaan pembangunan baik sosial maupun budaya selalu perlu menyadari dan menemukan indikasi-indikasi perubahan tuntutan. Oleh karena itu, pengembangan suatu kawasan pariwisata sangat penting dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta pengenalan budaya sosial masyarakat secara luas. Hasil penelitian dari Staf Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Yendi Beach mengemukakan bahwa :

“.....Harapan ke depan yaitu bukan saja wisatawan lokal yang datang saja di papua, tetapi bisa keluar dari Jawa atau kemancanegara ada yang bisa datang untuk mengikuti event Festival Biak Munara Wampasi ini sudah masuk dalam kalender event nasional dan nanti tahun depan Festival Biak Munara Wampasi sudah masuk dalam kalender event nasional”. (Hasil wawancara, 8 juli 2019)

Hasil wawancara di atas diuraikan bahwa Pengembangan Pariwisata Yendi Beach belum optimal. Hal ini terlihat konsentrasi pemerintah dalam mengelola Wisata Yendi Beach belum serius karena terlalu banyak objek wisata yang lain menjadi fokus pemerintah sementara Yendi Beach belum direncanakan pengembangannya.

Kepala Seksi Pendapatan dan Perencanaan Dinas Pariwisata Biak Numfor menyatakan:

“.....Untuk pengembangannya itu kita masih konsentrasi di Samber, Padwa, Adoki. Sementara di Yendidori ya kita berharap tahun-tahun depan itu sudah ada pengembangan disana. Nah, mungkin pertama yang kami dari pariwisata menyampaikan terima kasih untuk lembaga pendidikan tinggi yang ada di Biak yang punya perhatian itu khususnya IISIP YAPIS BIAK sudah memulai dengan beberapa kegiatan yang ada disana terus yang sudah Nampak” (Hasil wawancara, 10 Juli 2019).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan objek wisata Yendi Beach oleh Dinas Pariwisata belum terlihat. Hal ini masih mengharapkan bantuan dari pihak lain, dan disebabkan oleh fokus pengembangan yang dilakukan oleh dinas terdapat di tempat lain, sehingga hal ini terlihat bahwa Pengembangan Objek Wisata Yendi Beach belum maksimal dilakukan. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata harus mampu mengelola dan mempunyai konsep pengembangan pariwisata yang terarah dan punya manajemen yang jelas serta berbasis kemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sefira Ryalita Primadany dan Mardiyono, (2013) mengemukakan bahwa melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah. Pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan

sarana dan prasarana. Sarana sesuai dengan namanya menyediakan kebutuhan pokok yang ikut menentukan keberhasilan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata. Fasilitas yang tersedia dapat memberikan pelayanan kepada para wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

SIMPULAN

Peran pemerintah dalam pengembangan potensi pariwisata Yendi Beach di Kampung Yendidori Kabupaten Biak Numfor dominan sebagai motivator dibandingkan dengan peran lainnya, yaitu sebagai fasilitator maupun sebagai dinamisator. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata sebagai salah satu stakholder pariwisata di Kabupaten Biak Numfor dibutuhkan perannya dalam rangka memotivasi masyarakat, investor dan pengusaha wisata. Pentingnya kesadaran masyarakat Kabupaten Biak Numfor terhadap pengembangan pariwisata menuntut peran Dinas Pariwisata agar terus memberikan motivasi, baik itu berupa sosialisasi, pelatihan maupun dana stimulan. Motivasi juga perlu untuk terus diberikan kepada para investor dan pengusaha wisata di Kabupaten Biak Numfor agar investor dan pengusaha wisata tersebut tertarik mengembangkan usaha wisata Yendi Beach di Kampung Yendidori Kabupaten Biak Numfor, dan secara tidak langsung juga dapat meringankan beban anggaran dari Dinas Pariwisata dalam rangka pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Biak Numfor.

DAFTAR RUJUKAN

- Edyanto, K. (2018). Leadership Bupati Dalam Pembangunan Di Kabupaten Tambrauw (Studi Kepemimpinan Bupati Tambrauw). *Sosio E-Kons*, 10(2), 143–149.
- Eko Purnomo. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi. *Sosio E-Kons*, 10(1), 28–38.
- Harnida, M. T. (2012). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Obyek Wisata Hutan Batu Rammang-rammang Di Kabupaten Maros. *Otoritas*, II(2).
- Husnul Imtihan, Wahyunadi, F. (2017). Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Neo-Bis*, 11(1).
- Masita Hi.Modim, Andi Samsu alam, A. M. R. (2010). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Panorama Pantai Disa,Kec.Sahu, Kabupaten Halmahera Barat. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 29–36.
- Muh Asran Z Labaran, Lukman Hakim, R. H. (2014). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kakao Di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju. *Otoritas*, IV(1).
- Purmada, D., Wilopo, W., & Hakim, L. (2016). Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 32(2), 15–22.
- Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, R. (2013). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 135–143.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 231–236.

Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Taufik. (2013). Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 61–70.

Washua, O. (2017). Pengaruh Kepemimpinan, Diklat dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans RI. *Sosio E-Kons*, 9(1), 86–92.